

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, (Makassar: Kencana, 2007)
- Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2000)
- Basel Committee On Banking Supervision, *Sound Management of Risks Related to Money Laundering and Financing*, (Switzerland: Basel Committee On Banking Supervision, 2020)
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005)
- Darmansyah, *Ilmu dasar Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986)
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984), hlm. 7, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (studi mengenai peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Melkias Hetharia, *Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound*, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1996)
- Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, *Kajian Hukum Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2022)
- Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021)
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*, (Jakarta: Intermasa, 1991)
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan 27*. (Jakarta: Intermassa, 2014)

- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Amerika Serikat: Books Terrace & Library, 2007)

JURNAL

- Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)." *Jurnal Hukum Tora* Vol. 8 No. 3 (2022).
- Go Lisanawati, "Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang." *Journal of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism* Vol. 1 No. 2 (Juni 2023).
- I Made Dermawan, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Penghadapnya." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 1 (Maret 2017).
- Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2012).
- Judith Leona R. Panggabean, "Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pelaporan GoAML." *Seminar Indonesia Notary Community (INC)* (8 Oktober 2021).
- M. Arief Amrullah dan Fanny Tanuwijaya, "Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Humana* Vol. 1 No. 2 (2017).
- M Bintang Naufaldy dan Gandjar Laksmana Bonaparta. "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2 (2023).
- Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Rina Dewi Sartika Siahaan dan Muhsin Lambok Ilvira. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1 (Maret 2023).

- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44 No. 4, (2018).
- Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey. "Legal Culture: Description of Whole Legal System, dalam Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, *Law & Society : Reading on the Social Study of Law*. New York : W.W. Norton & Company, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol .22 No. 3 (2003).
- Tian Terina dan Rendy Renaldy. "Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 9 No. 1 (Mei 2020).
- Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*)." *Majalah Hukum Nasional* No. 2 (2018).
- Yalid dan Birman Simaora. "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara* (2021).
- Yalid. "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan." *Era Hukum* Vol. 19. No. 2 (Oktober 2021)

HASIL PENELITIAN

- Reza Fadhli, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan." Tesis, Depok: Universitas Islam Indonesia, 2018.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5709)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6680)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087)
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 960)
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1896)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5385)

INTERNET

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Tugas dan Fungsi PPATK," https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779, diakses pada 20 Mei 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Kabareskrim Polri: Kami Selalu Siap Bekerja Sama dengan PPATK," <https://www.ppatk.go.id/news/read/1122/www.ppatk.go.id>, diakses pada 20 Mei 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Promensisko 2023: Sinergi Nasional Penguatan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada NPO dan Korporasi di Indonesia." <https://www.ppatk.go.id/news/read/1260/promensisko-2023-sinergi-nasional-penguatan-mitigasi-risiko-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme-pada-npo-dan-korporasi-di-indonesia.html>, diakses pada 20 Mei 2024.